

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS I A KHUSUS

Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah



SI SUPER

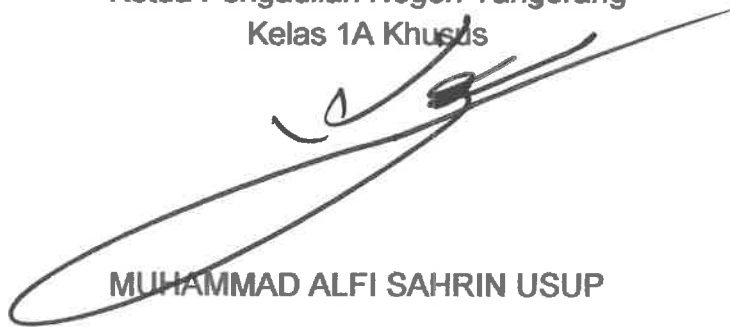
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS I A KHUSUS
TRIWULAN I 2026

LEMBAR PENGESAHAN

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019**

Disahkan di Tangerang,
Pada Hari Kamis, 02 April 2026

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Kelas 1A Khusus



MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

Ketua Tim Survei



ARI PRASETYO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tangerang mengadakan Survei Persepsi Anti Korupsi. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan survei dilakukan untuk mengetahui persepsi pengguna dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang, yang dilakukan secara elektronik.

Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan dan pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tangerang, 02 April 2026

Tim Survei

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan	8
C. Sasaran	8
D. Landasan Hukum.....	8
E. Definisi.....	9
BAB II	10
METODOLOGI	10
A. METODE PENELITIAN.....	10
B. POPULASI DAN SAMPEL	10
C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI.....	11
D. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI.....	11
E. PROSEDUR SURVEI.....	12
BAB III	13
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)	13
A. Profil Responden.....	13
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	18
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja	28
D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Tangerang.....	29
BAB IV	30
PENUTUP	30
A. Kesimpulan	30
B. Rekomendasi.....	30
BAB V	31
TINDAK LANJUT	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Kelamin Responden	13
Tabel 2 Tingkat Pendidikan Responden	14
Tabel 3 Jenis Pekerjaan Responden.....	15
Tabel 4 Jenis Pekerjaan Responden.....	15
Tabel 5 Domisili Responden.....	16
Tabel 6 Usia Responden.....	17
Tabel 7 Manipulasi Peraturan.....	18
Tabel 8 Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	19
Tabel 9 Indikator Menjual Pengaruh.....	20
Tabel 10 Indikator Transaksi Biaya.....	21
Tabel 11 Indikator Biaya Tambahan.....	22
Tabel 12 Indikator Hadiah.....	23
Tabel 13 Indikator Transparansi Biaya.....	24
Tabel 14 Indikator percaloan	25
Tabel 15 Indikator Perbuatan Curang	26
Tabel 16 Indikator Transaksi Rahasia.....	27
Tabel 17 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Tangerang.....	28
Tabel 18 Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tangerang.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Jenis Kelamin Responden.....	13
Gambar 2 Tingkat Pendidikan Responden.....	14
Gambar 3 Jenis Pekerjaan Responden.....	15
Gambar 4 Domisili Responden.....	16
Gambar 5 Usia Responden.....	17
Gambar 6 Manipulasi Peraturan.....	18
Gambar 7 Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	19
Gambar 8 Indikator Menjual Pengaruh.....	20
Gambar 9 Indikator Transaksi Biaya.....	21
Gambar 10 Indikator Biaya Tambahan.....	22
Gambar 11 Indikator Hadiah.....	23
Gambar 12 Indikator Transparansi Biaya.....	24
Gambar 13 Indikator Percaloan.....	25
Gambar 14 Indikator Perbuatan Curang.....	26
Gambar 15 Indikator Transaksi Rahasia.....	27
Gambar 16 Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik. Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Pengadilan Negeri Tangerang sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan sertamewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus.

B. Tujuan

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan antigratifikasi.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

E. Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

9 (Sembilan) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. Ilegal profit;
4. Secret transaction;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme.

BAB II

METODOLOGI

A. METODE PENELITIAN

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing-masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing unit pelayanan. Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

dimana :

n = Ukuran Sampel N = Ukuran Populasi

λ^2 = Nilai Chi Kuadrat = 3,841

P = Populasi Menyebarkan Normal = Q = 0,5

D = Nilai Batas Kesalahan / Galat Pendugaan = 0,05

Dengan memperhatikan jumlah populasi dalam 1 (satu) triwulan periode survey di Pengadilan Negeri Tangerang adalah kurang lebih 750 orang, maka berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan, jumlah responden yang representatif ditetapkan sejumlah 250 orang.

C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (e- survey) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu masyarakat selaku pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu masyarakat yang menerima pelayanan selama periode TRIWULAN I Tahun 2026. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

1. PERSIAPAN

- a) Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPAK.
- b) Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c) Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survey.

2. PROSES SURVEI

- a) Pelaksanaan e-survey dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik).
- b) Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui E- survey dilakukan dengan mengakses link berikut: <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>.
- c) Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan e-survey.

D. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 4. Skala indeks

persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

E. PROSEDUR SURVEI

Responden dapat mengisi e-survey persepsi korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Tangerang baik melalui komputer/laptop /smartphone. Sebelum menjawab e-survey, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, Nomor Telp dan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat IPAK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-survey. Adapun indikator- indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

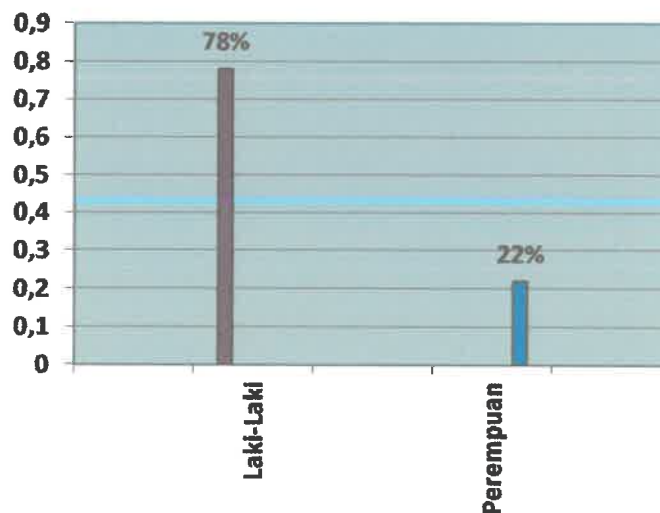
A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 221 responden, dimana pengguna layanan yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 172 orang atau 78% dan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 49 orang atau 22%.

Tabel 1 Jenis Kelamin Responden

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	Laki-Laki	172	78%
2.	Perempuan	49	22%
	TOTAL	221	100%



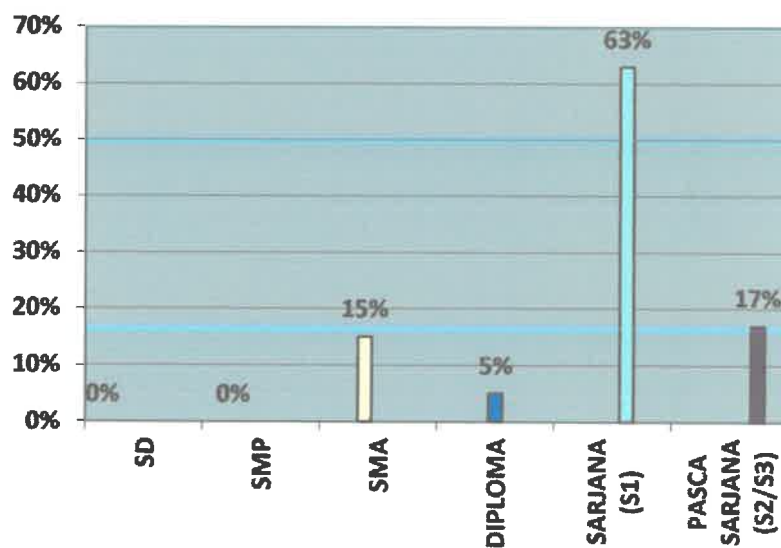
Gambar 1 Grafik Jenis Kelamin Responden

2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Tangerang mayoritas memiliki latar belakang tingkat pendidikan tinggi.

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Responden

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	SD	0	0%
2.	SMP	1	0%
3.	SMU	33	15%
4.	DIPLOMA	11	5%
5.	SARJANA (S1)	139	63%
6.	PASCA SARJANA (S2/S3)	37	17%
	TOTAL	221	100%



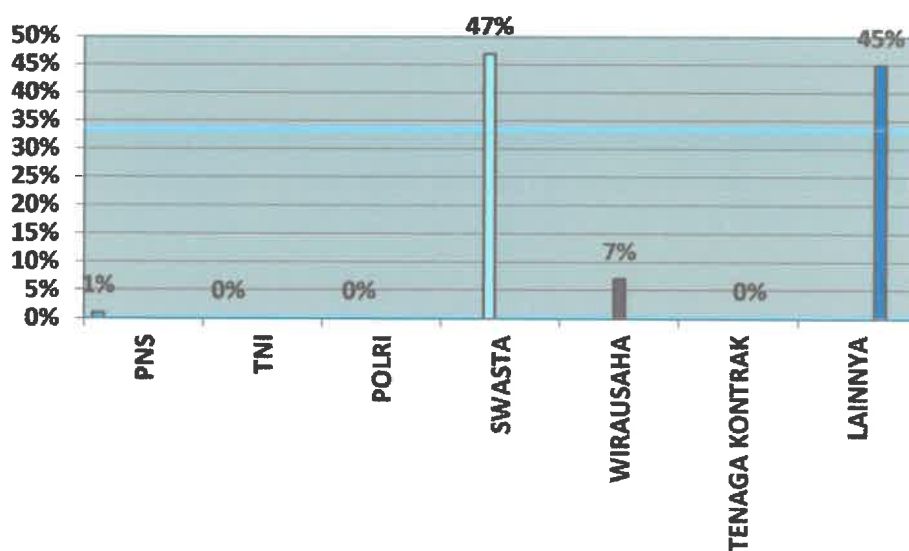
Gambar 2 Tingkat Pendidikan Responden

3. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 47% responden atau mayoritas pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Tangerang memiliki pekerjaan sebagai Swasta.

Tabel 3 Jenis Pekerjaan Responden

NO	PEKERJAAN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	PNS	3	1%
2.	TNI	1	0%
3.	POLRI	0	0%
4.	SWASTA	104	47%
5.	WIRUSAHA	16	7%
6.	TENAGA KONTRAK	0	0%
7.	LAINNYA	97	45%
	TOTAL	221	100%



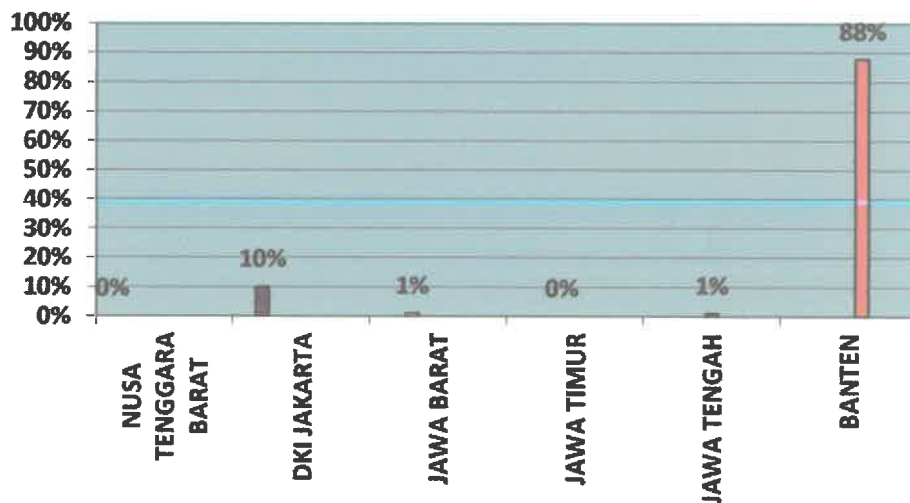
Gambar 3 Jenis Pekerjaan Responden

4. Domisili Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa domisili pengguna layanan terbesar di Banten dengan total responden sebanyak 193 orang.

Tabel 5 Domisili Responden

NO.	DOMISILI	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	NUSA TENGGARA BARAT	1	0%
2.	DKI JAKARTA	23	10%
3.	JAWA BARAT	2	1%
4.	JAWA TIMUR	0	0%
5.	JAWA TENGAH	2	1%
6.	BANTEN	193	88%
	TOTAL	221	100%



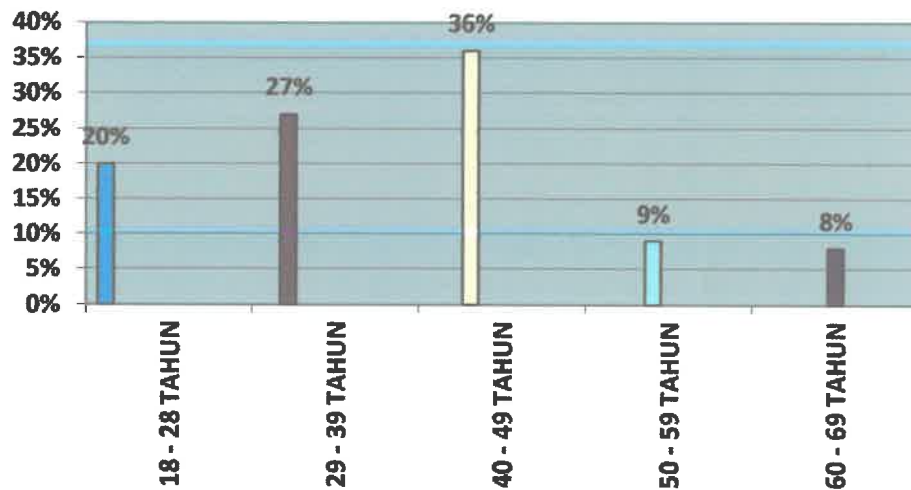
Gambar 4 Domisili Responden

5. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 40-49 Tahun dengan presentase sebesar 36% dari total responden.

Tabel 6 Usia Responden

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	18 - 28 TAHUN	45	20%
2.	29 - 39 TAHUN	60	27%
3.	40 - 49 TAHUN	80	36%
4.	50- 59 TAHUN	16	9%
5.	60 - 69 TAHUN	20	8%
	TOTAL	221	100%



Gambar 5 Usia Responden

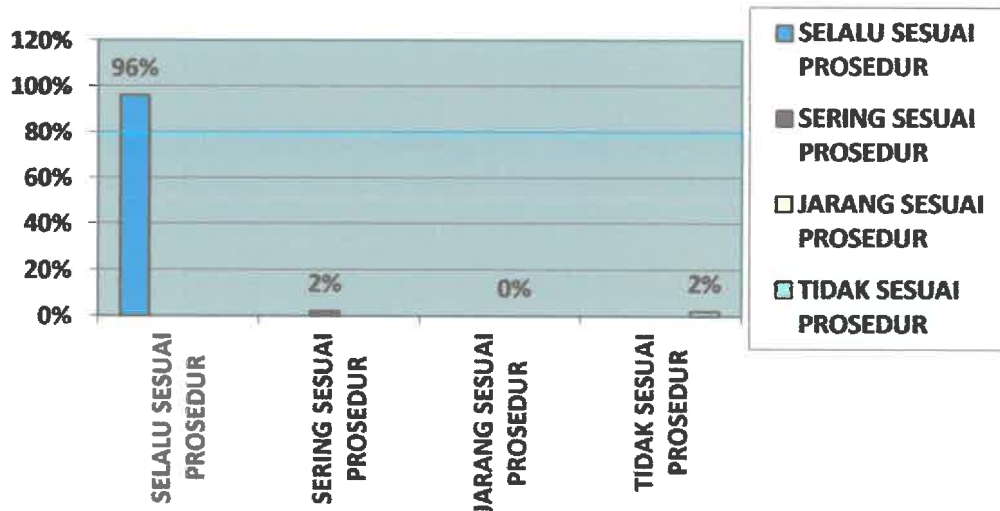
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1. Manipulasi Peraturan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan menunjukkan hasil 96% responden menyatakan selalu sesuai prosedur, berarti dapat disimpulkan bahwa pelayanan oleh petugas selalu sesuai prosedur pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 7 Manipulasi Peraturan

NO.	PROSEDUR PETUGAS	INDEKS	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	SELALU SESUAI PROSEDUR	4	213	96%
2.	SERING SESUAI PROSEDUR	3	4	2%
3.	JARANG SESUAI PROSEDUR	2	0	0%
4.	TIDAK SESUAI PROSEDUR	1	4	2%
		3,928	221	100%



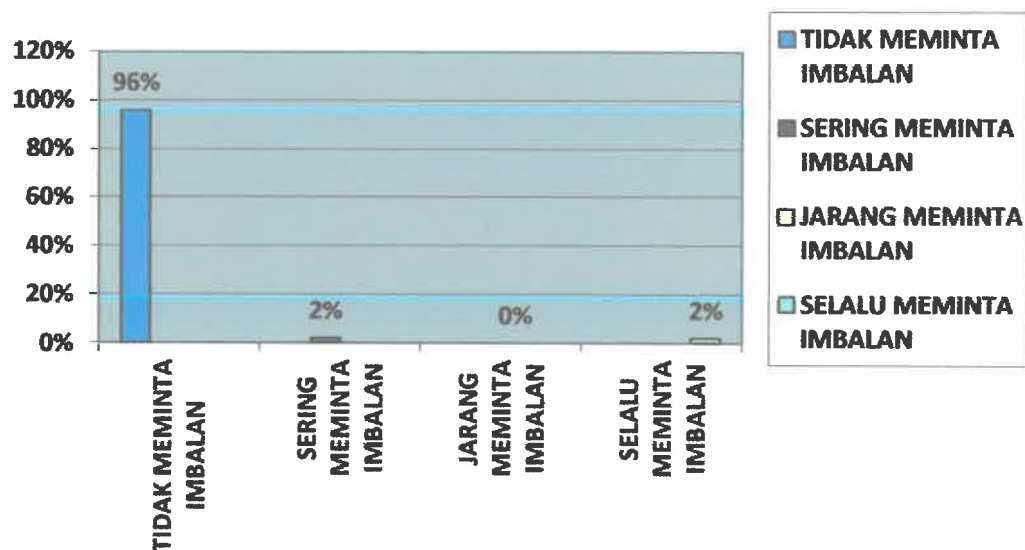
Gambar 6 Manipulasi Peraturan

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator penyalahgunaan jabatan menunjukkan hasil 96% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan jabatan pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 8 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

NO	Layanan Pengadilan Secara Cepat dan Mudah Selalu Diberikan Tanpa Ada Penawaran Dari Petugas	INDEKS	FREKUENSI	PRESENTASE
1	TIDAK MEMINTA IMBALAN	4	213	96%
2	SERING MEMINTA IMBALAN	3	4	2%
3	JARANG MEMINTA IMBALAN	2	0	0%
4	SELALU MEMINTA IMBALAN	1	4	2%
		3,928	221	100%



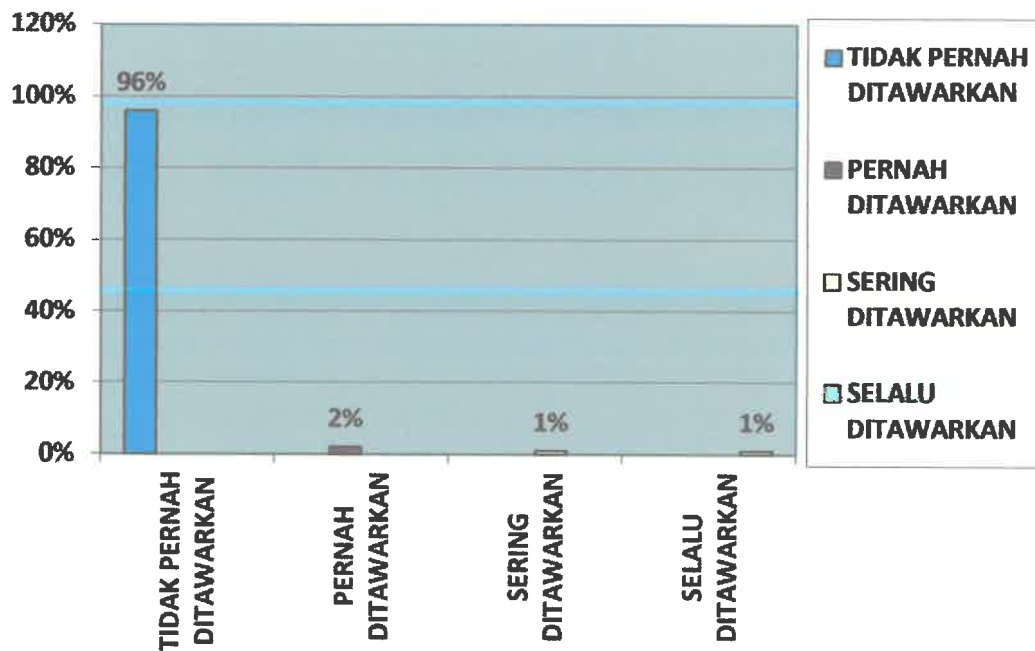
Gambar 7 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh menunjukkan hasil 96% responden menyatakan tidak pernah ditawarkan, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat menjual pengaruh pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 9 Indikator Menjual Pengaruh

NO	Dihubungi Karyawan Pengadilan yang akan membantu dalam pengurusan	INDEKS	FREKUENSI	PRESENTASE
1	TIDAK PERNAH DITAWARKAN	4	211	96%
2	PERNAH DITAWARKAN	3	4	2%
3	SERING DITAWARKAN	2	3	1%
4	SELALU DITAWARKAN	1	3	1%
		3,914	221	100%



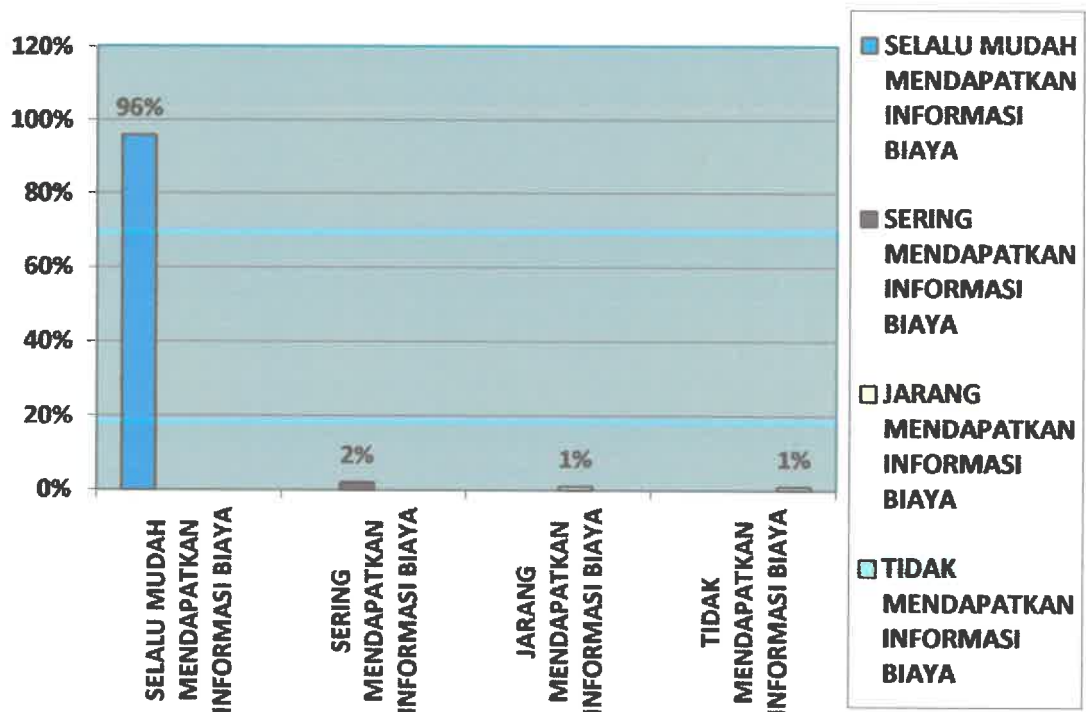
Gambar 8 Indikator Menjual Pengaruh

4. Indikator Transaksi Biaya

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya menunjukkan hasil 96% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa selalu mudah untuk mendapatkan informasi biaya pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 10 Indikator Transaksi Biaya

NO	INDIKATOR TRANSAKSI BIAYA	INDEKS	FREKUENSI	PRESENTASE
1	SELALU MUDAH MENDAPATKAN INFORMASI BIAYA	4	212	96%
2	SERING MENDAPATKAN INFORMASI BIAYA	3	5	2%
3	JARANG MENDAPATKAN INFORMASI BIAYA	2	2	1%
4	TIDAK MENDAPATKAN INFORMASI BIAYA	1	2	1%
		3,932	221	100%



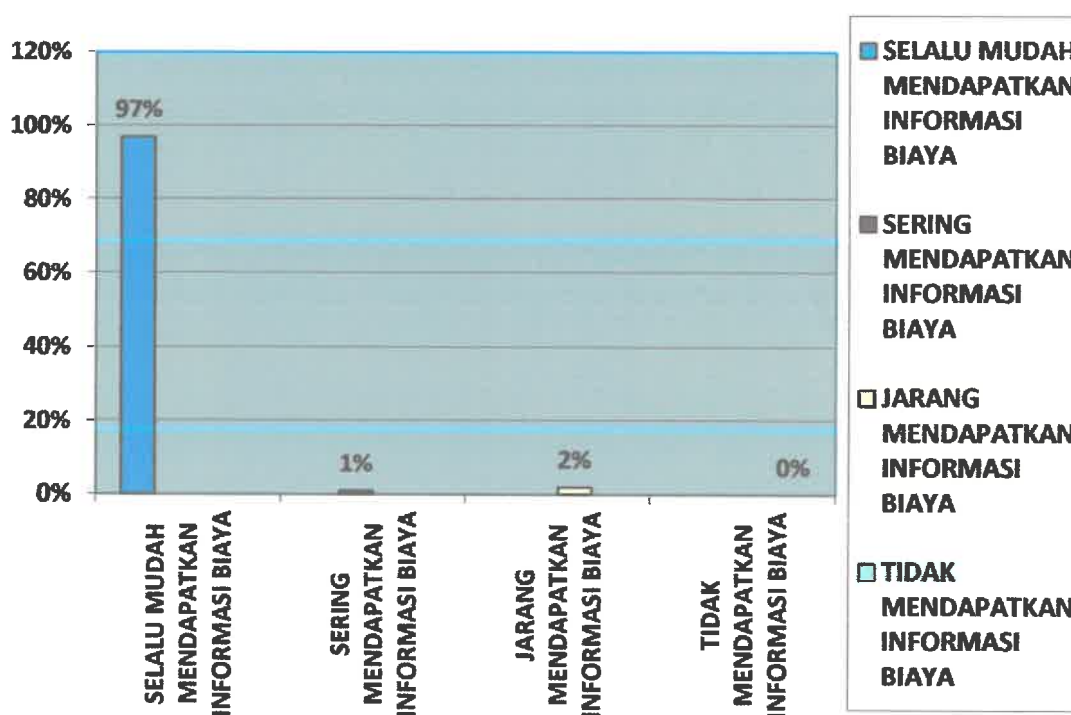
Gambar 9 Indikator Transaksi Biaya

5. Indikator Biaya Tambahan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan menunjukkan hasil 97% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Biaya Tambahan pada Layanan Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 11 Indikator Biaya Tambahan

NO	INDIKATOR BIAYA TAMBAHAN	INDEKS	FREKUENSI	PRESENTASE
1	SELALU MUDAH MENDAPATKAN INFORMASI BIAYA	4	214	97%
2	SERING MENDAPATKAN INFORMASI BIAYA	3	3	1%
3	JARANG MENDAPATKAN INFORMASI BIAYA	2	4	2%
4	TIDAK MENDAPATKAN INFORMASI BIAYA	1	0	0%
		3,950	221	100%



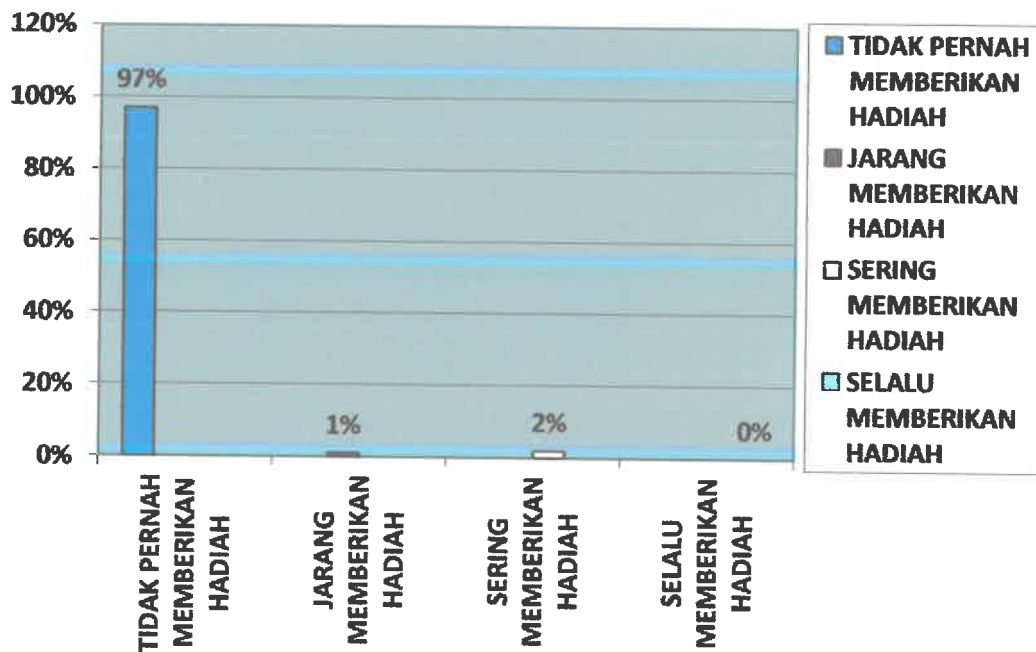
Gambar 10 Indikator Biaya Tambahan

6. Indikator Hadiah

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Hadiah menunjukkan hasil 97% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pemberian hadiah pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 14 Indikator Hadiah

NO	MEMBERIKAN TANDA TERIMA KASIH PELAYANAN	INDEKS	FREKUENSI	PRESENTASE
1	TIDAK PERNAH MEMBERIKAN HADIAH	4	213	97%
2	JARANG MEMBERIKAN HADIAH	3	3	1%
3	SERING MEMBERIKAN HADIAH	2	4	2%
4	SELALU MEMBERIKAN HADIAH	1	1	0%
		3,937	221	100%



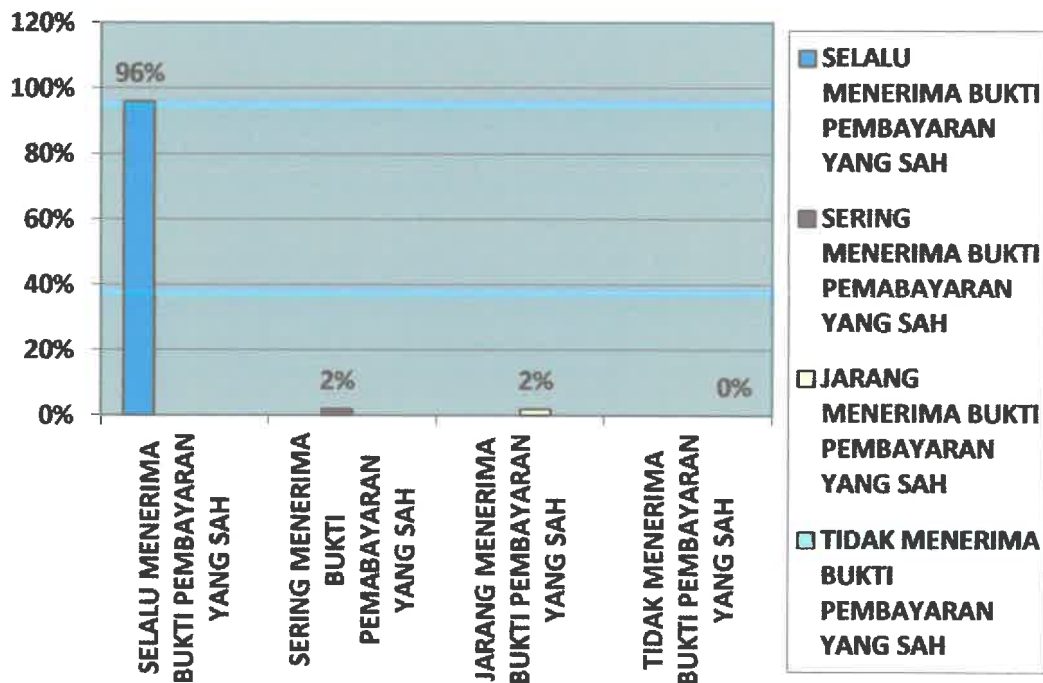
Gambar 11 Indikator Hadiah

7. Indikator Transparansi Biaya

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya menunjukkan hasil 96% responden menyatakan selalu menerima bukti pembayaran yang sah pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 17 Indikator Transparansi Biaya

NO	TRANSPARANSI BIAYA	INDEKS	FREKUENSI	PRESENTASE
1	SELALU MENERIMA BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH	4	211	96%
2	SERING MENERIMA BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH	3	5	2%
3	JARANG MENERIMA BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH	2	5	2%
4	TIDAK MENERIMA BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH	1	0	0%
		3,932	221	100%



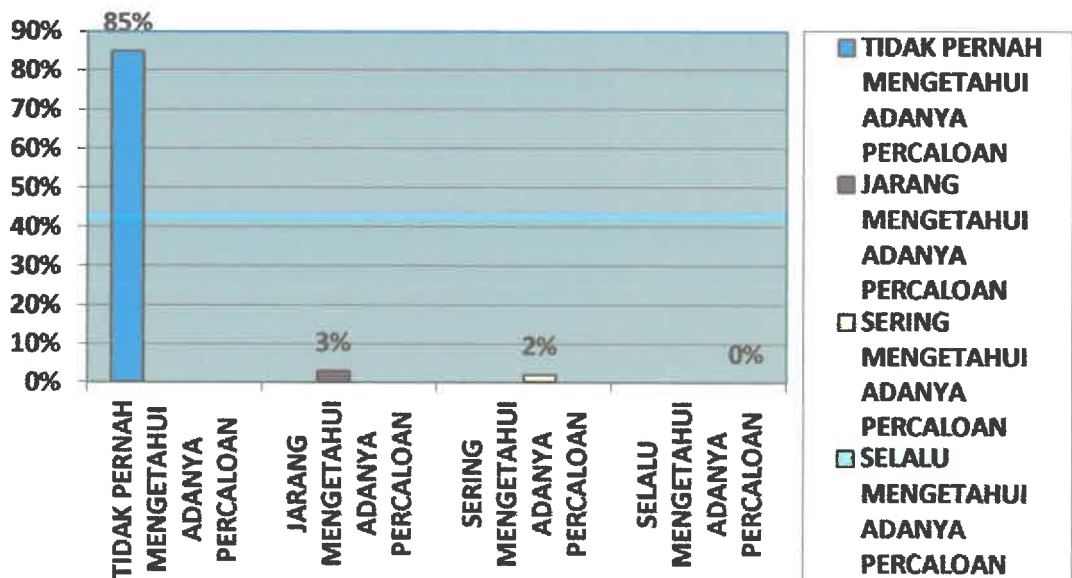
Gambar 12 Indikator Transparansi Biaya

8. Indikator Percaloan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Percaloan menunjukkan hasil 95% responden menyatakan tidak pernah ada percaloan pada Layanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 20 Indikator percaloan

NO	Mengetahui ada Praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan	INDEKS	FREKUENSI	PRESENTASE
1	TIDAK PERNAH MENGETAHUI ADANYA PERCALOAN	4	211	95%
2	JARANG MENGETAHUI ADANYA PERCALOAN	3	6	3%
3	SERING MENGETAHUI ADANYA PERCALOAN	2	4	2%
4	SELALU MENGETAHUI ADANYA PERCALOAN	1	0	0%
		3,937	221	100%



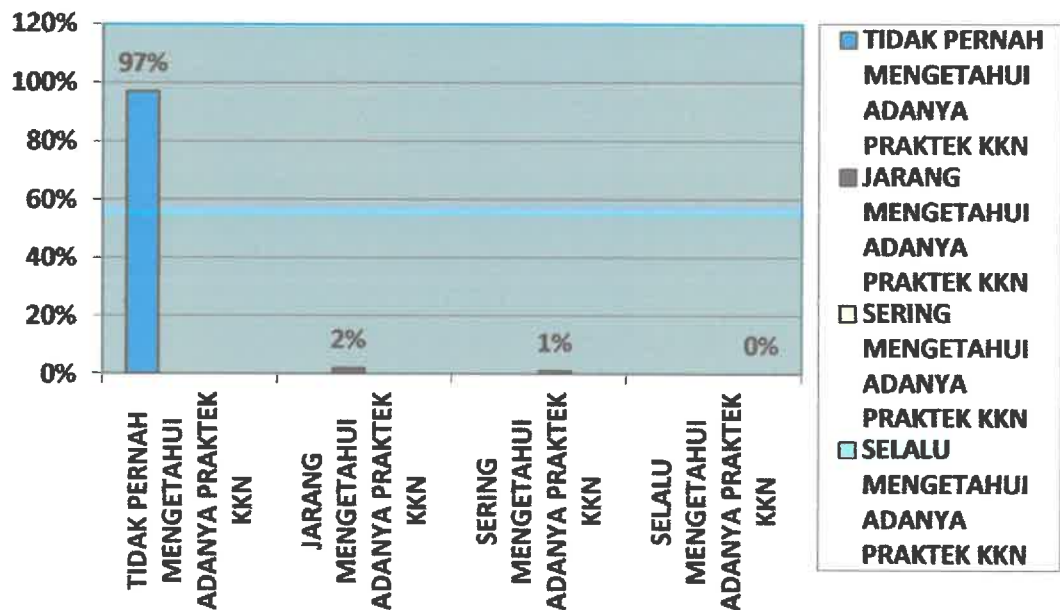
Gambar 13 Indikator Percaloan

9. Indikator Perbuatan Curang

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang menunjukkan hasil 97% responden menyatakan tidak terdapat perbuatan curang pada Pengadilan Tangerang.

Tabel 23 Indikator Perbuatan Curang

NO	PRAKTEK KKN DI PENGADILAN	INDEKS	FREKUENSI	PRESENTASE
1	TIDAK PERNAH MENGETAHUI ADANYA PRAKTEK KKN	4	213	97%
2	JARANG MENGETAHUI ADANYA PRAKTEK KKN	3	5	2%
3	SERING MENGETAHUI ADANYA PRAKTEK KKN	2	3	1%
4	SELALU MENGETAHUI ADANYA PRAKTEK KKN	1	0	0%
		3,950	221	100%



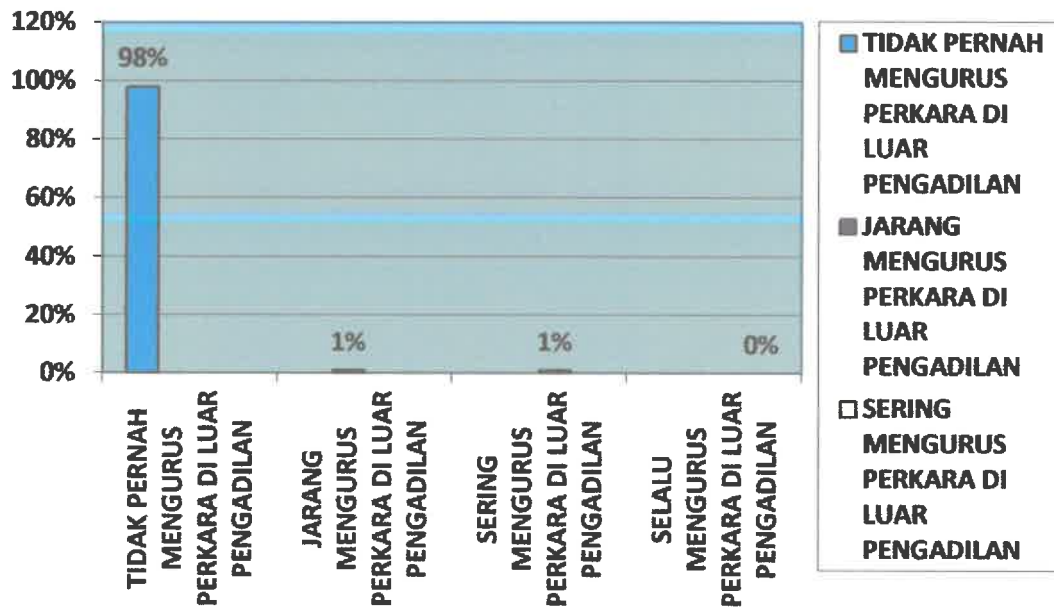
Gambar 14 Indikator Perbuatan Curang

10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia menunjukkan hasil 98% responden menyatakan tidak pernah mengurus perkara di luar Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 26 Indikator Transaksi Rahasia

NO	INDIKATOR TRANSAKSI RAHASIA	INDEKS	FREKUENSI	PRESENTASE
1	TIDAK PERNAH MENGURUS PERKARA DI LUAR PENGADILAN	4	215	98%
2	JARANG MENGURUS PERKARA DI LUAR PENGADILAN	3	3	1%
3	SERING MENGURUS PERKARA DI LUAR PENGADILAN	2	3	1%
4	SELALU MENGURUS PERKARA DI LUAR PENGADILAN	1	0	0%
		3,959	221	100%



Gambar 15 Indikator Transaksi Rahasia

C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja

Dari 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 3,94.

NO	LINGKUP	NILAI RATA - RATA	PERINGKAT
1	MANIPULASI PERATURAN	3.928	9
2	PENYALAHGUNAAN JABATAN	3.928	8
3	MENJUAL PENGARUH	3.914	10
4	TRANSAKSI BIAYA	3.932	6
5	BIAYA TAMBAHAN	3.950	2
6	HADIAH	3.937	4
7	TRANSPARANSI BIAYA	3.932	7
8	PERCALOAN	3.937	5
9	PERBUATAN CURANG	3.950	3
10	TRANSAKSI RAHASIA	3.959	1
	NILAI INDEKS PERSEPSI KORUPSI	3.94	
	KONVERSI NILAI IPAK	98.42%	

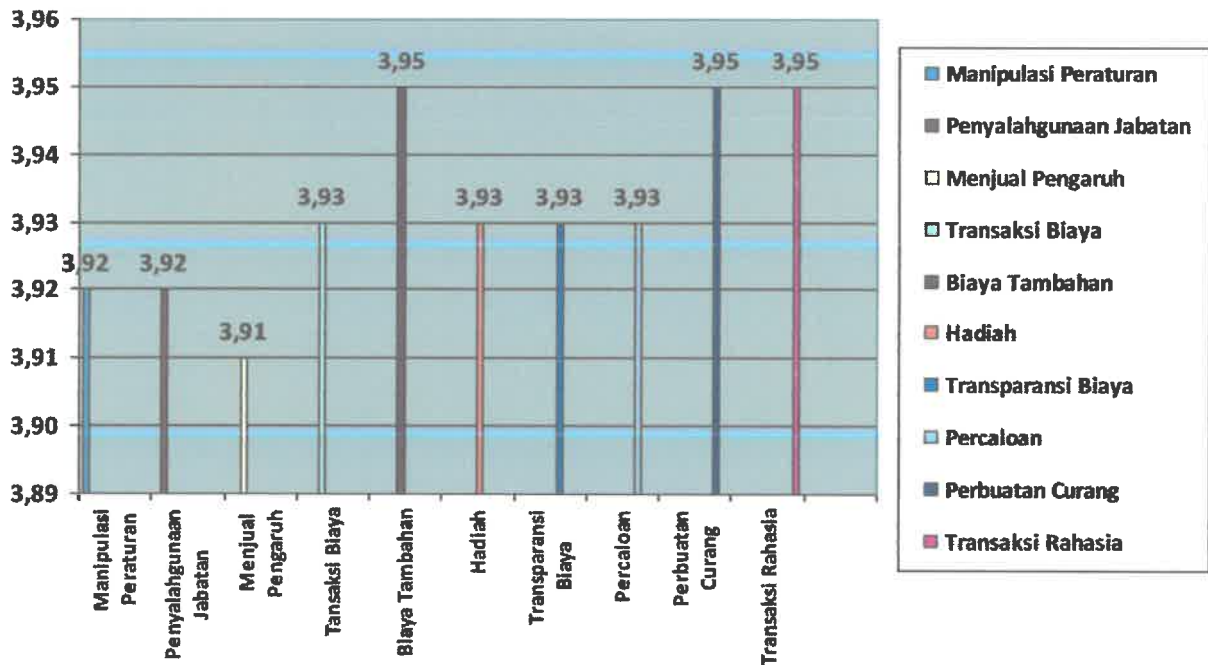
Tabel 16 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Tangerang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Tabel 17 Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tangerang

D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Tangerang

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkit masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Tangerang.



Gambar 16 Indeks Persepsi Anti Korupsi

Selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI, dimana nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 -100.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum, hasil survei persepsi anti korupsi pada pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi 3,94 atau masuk kategori BERSIH DARI KORUPSI (kisaran nilai 3.26 - 4.00). Dengan demikian, petugas pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
2. Selanjutnya, dari Nilai IPAK yang telah diperoleh dari masyarakat sebagai pengguna layanan maka dapat disimpulkan layanan pada Pengadilan Negeri Tangerang bebas dari korupsi.
3. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu Hadiah, Menjual Pengaruh dan Manipulasi Peraturan yang dinilai cukup bersih dari korupsi tetapi kemungkinan masih cukup berpotensi adanya KKN meskipun persentasinya kecil. Dengan demikian, ke depan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua prosedur pelayanan perlu ditingkatkan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil e-survey IPAK terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang, maka perlu upaya untuk memperbaiki Menjual Pengaruh, Manipulasi Peraturan dan Penyalahgunaan Jabatan sehingga proses pemberian layanan akan terpantau dalam semua tahapan.

BAB V

TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan nilai IPAK pada TRIWULAN I Tahun 2026, maka Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus akan melakukan beberapa perbaikan diantaranya:

1. Menjual Pengaruh :

Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas pemberian layanan hanya pada ruang PTSP dan Ruang Tamu Terbuka. Serta mensosialisasikan biaya resmi kepada pengguna pelayanan.

2. Manipulasi Peraturan :

Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal melakukan semua pelayanan dan pemberian informasi kepada pengguna layanan dihimbau untuk selalu berpedoman dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.

3. Penyalahgunaan Jabatan :

Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku dengan biaya sesuai dengan Standar Pelayanan dan tidak meminta imbalan apapun.

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan maka nilai IPAK Pengadilan Negeri Tangerang pada Triwulan II Tahun 2026 akan meningkat dan mencapai kategori sangat baik dengan nilai yang lebih tinggi.

LAMPIRAN

No	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Belanja
1	Clara	BANTEN	29 Tahun	Perempuan	SIPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Maret 2026
2	Rahman	BANTEN	41 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Maret 2026
3	Hartono	DKI JAKARTA	33 Tahun	Laki-laki	SITNI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Maret 2026
4	Nawangmulan	BANTEN	30 Tahun	Perempuan	Diploma 3WIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Maret 2026
5	Farhan Taufiq	DKI JAKARTA	23 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Maret 2026
6	Seedirman	BANTEN	26 Tahun	Laki-laki	Diploma 3SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Maret 2026
7	Trilando	DKI JAKARTA	25 Tahun	Laki-laki	SIPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Maret 2026
8	Ariestya NurSyahadattin	BANTEN	35 Tahun	Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Maret 2026
9	Roy Budiman	DKI JAKARTA	37 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Maret 2026
10	Immanuel Paidjo, SH	DKI JAKARTA	42 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Maret 2026
11	Mohammad Zain Severo, SH	BANTEN	45 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Maret 2026
12	Mersiah	BANTEN	27 Tahun	Laki-laki	SMUSWASTA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12 Maret 2026
13	Rahmansyah, SH., MH	BANTEN	40 Tahun	Laki-laki	SZLAINNYA	1	1	2	2	2	2	2	3	3	12 Maret 2026
14	Declin	BANTEN	24 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	1	1	1	2	2	2	2	2	2	12 Maret 2026
15	Rudi Hartono	DKI JAKARTA	32 Tahun	Laki-laki	SZLAINNYA	1	1	1	1	2	2	2	2	2	12 Maret 2026
16	Evy Nawangmulan	BANTEN	29 Tahun	Perempuan	Diploma 3SWASTA	1	1	2	1	2	2	2	2	2	12 Maret 2026
17	Venny Tumoro	BANTEN	49 Tahun	Perempuan	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
18	Yuser Agus BudiYana	BANTEN	66 Tahun	Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
19	Adrian Pardomuan Purba	DKI JAKARTA	55 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
20	Fathul Amarullah, SH.	BANTEN	54 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
21	Fathul Amarullah, SH.	BANTEN	54 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
22	Hendra Belfinov Purba	BANTEN	47 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
23	Tini Saputri	DKI JAKARTA	35 Tahun	Perempuan	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
24	Mira Kartika Putri	BANTEN	27 Tahun	Perempuan	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
25	Fahrudin, SH.	BANTEN	50 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
26	Gracia	BANTEN	39 Tahun	Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
27	Clara Marsulina P	BANTEN	36 Tahun	Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
28	Ahmad Ajiji	BANTEN	44 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
29	Mefren	BANTEN	56 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
30	Ihlem Marulloh	BANTEN	35 Tahun	Laki-laki	SZSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Maret 2026
31	LAKSONO HADISISWANTO PUTRO	BANTEN	39 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Februari 2026
32	LUNY DAFIT HERMAWAN	BANTEN	35 Tahun	Laki-laki	Diploma 3SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Februari 2026
33	NICHOLAS ALVEROZ HUTAGAOL	BANTEN	26 Tahun	Laki-laki	S1WIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Februari 2026
34	MARHATA SENTANU	BANTEN	63 Tahun	Laki-laki	SZLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Februari 2026
35	MARHATA SENTANU	BANTEN	62 Tahun	Laki-laki	SZLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Februari 2026
36	MASHUDI	BANTEN	48 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Februari 2026
37	Farhan Taufiqur Rahman	DKI JAKARTA	21 Tahun	Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2026
38	Trilando Hasibuan	DKI JAKARTA	21 Tahun	Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2026
39	Ariestya NurSyahadattin	BANTEN	40 Tahun	Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2026
40	Roy Budiman	DKI JAKARTA	31 Tahun	Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2026
41	Immanuel Paidjo, S.H.	DKI JAKARTA	27 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2026
42	Mohammad Zain Severo, S.H.	BANTEN	26 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2026
43	Mersiah	BANTEN	28 Tahun	Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2026
44	Rahmansyah, S.H., M.H.	BANTEN	35 Tahun	Laki-laki	SZLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2026
45	Declin	BANTEN	27 Tahun	Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2026
46	Rudi Hartono Butarbutar	DKI JAKARTA	39 Tahun	Laki-laki	SZLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2026
47	Evy Nawangmulan	BANTEN	40 Tahun	Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2026
48	Asep Setiadi	BANTEN	43 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Februari 2026
49	Aswadi	BANTEN	40 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Februari 2026
50	Satika Anjani	BANTEN	42 Tahun	Perempuan	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Februari 2026
51	Dita Adiyanti	BANTEN	26 Tahun	Perempuan	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Februari 2026
52	MURHAMMAD FAJRI SHIDDIQ	BANTEN	25 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Februari 2026
53	ARHIS SETIAWAN	BANTEN	40 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Februari 2026
54	JOHI IBRAHIM	BANTEN	58 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Februari 2026
55	JAMBARI S,H,M,H	JAWA BARAT	36 Tahun	Laki-laki	SZLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Februari 2026
56	RACHELLA ANATASA BRAWAN	BANTEN	26 Tahun	Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Februari 2026
57	M ALEXANDER WENAS	BANTEN	40 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Februari 2026
58	RIA WURMANSIAH TRIATMADJA	BANTEN	49 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Februari 2026
59	MELVIANDY HERRY TARGAM	BANTEN	51 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Februari 2026
60	MUHAMMAD BAJAA ARYAPUTRA	BANTEN	26 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Februari 2026
61	UJUM SETIAWAH	BANTEN	46 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Februari 2026
62	Stamet Widodo	BANTEN	49 Tahun	Laki-laki	Diploma 1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 Februari 2026
63	Maysur Abdussaleem	BANTEN	43 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 Februari 2026
64	Fauzul Mona	BANTEN	33 Tahun	Perempuan	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Februari 2026
65	Dwi Martha Ardiyanto	BANTEN	43 Tahun	Laki-laki	SZSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Februari 2026
66	Herbert Ferdinand Stehaan	BANTEN	58 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Februari 2026
67	Yakobus Bulo	BANTEN	67 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Februari 2026
68	Heloli Rismawan Efendi	BANTEN	26 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Februari 2026
69	Heloli Rismawan Efendi	BANTEN	26 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Februari 2026
70	Marco Handoko	BANTEN	40 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Februari 2026
71	Kevin Akbar Usiang Lubis	BANTEN	29 Tahun	Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Februari 2026
72	JOHI IBRAHIM	BANTEN	58 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Februari 2026
73	SANTOSO	BANTEN	58 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Februari 2026
74	Sangap Tua Mitorga	BANTEN	59 Tahun	Laki-laki	Diploma 2WIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Februari 2026
75	ACHMAD ZAMZAMI	BANTEN	40 Tahun	Laki-laki	SZWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Februari 2026
76	Septian Hariri	BANTEN	39 Tahun	Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Februari 2026
77	AHMAD SULAIMAN	BANTEN	29 Tahun	Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Februari 2026
78	DICKY YULIAN SAPUTRA	BANTEN	40 Tahun	Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Februari 2026

